

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pencapaian tujuan suatu program/kegiatan akan lebih terarah efektif dan efisien jika dimulai dengan adanya suatu perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan Rencana kerja pembangunan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Tahapan dalam perumusan kebijakan secara umum berangkat dari penetapan profil unit kerja/instansi, dalam hal ini terutama adalah ketugasan dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP), pencermatan dan analisis berbagai isu dan perubahan langkah strategis, perekaman arahan yang logis dan visioner serta tersedianya peraturan yang transparan. Dengan posisi BKPP sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sudah sewajarnya dalam perumusan kebijakan senantiasa memadukan antara prinsip *top-down policy* dan prinsip *bottom up planning*. Dalam penyusunan kebijakan sudah semestinya mengintegrasikan apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai.

Dalam perspektif manajemen, perumusan kebijakan, program/kegiatan, dan anggaran seharusnya memanfaatkan hasil evaluasi. Namun demikian, sejauh ini hasil evaluasi pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan belum dimanfaatkan secara optimal

sebagai masukan penting untuk penyusunan kebijakan berikutnya atau sebagai koreksi dari suatu kebijakan. Kegiatan evaluasi melalui pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang secara berkala dilakukan untuk mengungkapkan implementasi pelaksanaan program/kegiatan. Hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian *reward* dan *punishment* dalam pengelolaan program/kegiatan dan anggaran .

Perumusan kebijakan, program/kegiatan, dan anggaran sesungguhnya merupakan formulasi penyelesaian masalah yang telah teridentifikasi dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan. Beberapa hal yang dihadapi dan sekaligus menggambarkan pengaruhnya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien antara lain:

- a. Perkembangan geoekonomi dan krisis ekonomi global;
- b. *Millenium Development Goals* terutama terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan; yang dalam perkembangannya dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- c. Ancaman kelaparan global dan ketergantungan pangan serta inputan produksi pangan dari luar negeri (*food trap*);
- d. Kondisi dan beban ganda keamanan pangan serta *emerging issues*;
- e. Kondisi kemiskinan dan pengangguran yang berlanjut pada rawan pangan;
- f. Perubahan iklim global, konversi serta degradasi sumberdaya lahan dan air yang berdampak pada pengurangan penyediaan bahan pangan strategis.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pemantapan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat tahun 2016 telah mengacu pada agenda 7.1. NAWACITA, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, RPJMN 2015-2019 Pembangunan Pertanian, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2015-

2019, RPJMD DIY 2012-2017, dan Renstra BKPP DIY 2012-2017. Sub agenda tersebut yaitu **Peningkatan Kedaulatan Pangan** yang perlu didukung dengan : (i) peningkatan kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) upaya melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

2. Landasan Hukum

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7). Dalam perkembangannya perarutran daerah tersebut telah berganti dengan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2015 tentang rincian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja urusan ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan;

- c. pengelolaan, pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan pangan;
- d. pengelolaan, pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian distribusi pangan;
- e. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian konsumsi dan kewaspadaan pangan;
- f. pengoordinasian, dan pemberian fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;
- g. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pangan khas DIY untuk ketahanan pangan;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan ketahanan pangan dan penyuluhan;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) BKPP disusun dengan maksud menyediakan acuan kerja bagi penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di DIY tahun 2017. Tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Menjamin konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
2. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan;
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis dan berkelanjutan;
4. Menyediakan tolok banding (*benchmark*) dalam pengukuran kinerja Kepala BKPP.

4. Data dan Informasi

A. Data Kewilayahan

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2015 mencapai 3.679.176 jiwa dengan penduduk miskin sebanyak 550.230 jiwa (14,91%) dari total jumlah penduduk (BPS DIY, 2016). Kemiskinan berkorelasi positif dengan kerawanan pangan, semakin tinggi angka kemiskinan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya rawan pangan penduduk. Kondisi kerawanan pangan secara tidak langsung dapat dilihat melalui keberadaan Desa Rawan Pangan yang sampai tahun 2015 masih tersisa 20 desa, tersebar pada 4 Kabupaten di DIY.

Kerawanan pangan juga dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 2.000 kkal/kapita/hari yang pada tahun 2013 masih 61,04% (BPS, 2014). Pada tahun 2015 konsumsi energi mencapai 1.946,40 K.kal/kapita/hari. Sedangkan jumlah konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2015 mencapai sebesar 60 gram/kapita/hari, dan berada di atas angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung menurun pada tahun 2011-2015. Pada periode Maret 2011 jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 562,70 ribu jiwa, terus berkurang hingga pada Maret 2015 menjadi 550.230 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2014 (ribuan jiwa) Tahun

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	90,00	146,90	148,70	117,00	37,80
2011	92,76	159,38	157,09	117,32	37,74
2012	92,44	158,78	156,49	116,84	37,55
2013	86,50	156,61	152,38	110,84	35,62
2014	84,67	153,49	148,39	110,44	35,60

Sumber: BPS,2015

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya turun sebesar 1,17 persen poin,

sementara angka kemiskinan Nasional telah mengalami penurunan hingga 1,27 persen poin. Periode Maret 2014 -Maret 2015, angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya turun hingga 0,09 poin, sedangkan Indonesia berkurang 0,03 poin. Persentase penduduk miskin (angka kemiskinan) di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan Indonesia. Pada Maret 2015, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 14,91 persen atau lebih tinggi 3,69 persen poin dari tingkat kemiskinan Indonesia.

Menurut data BPS tahun 2015, Luas penggunaan lahan untuk pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014, terluas terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo, masing-masing mencapai 125.567 hektar dan 45.323 hektar. Namun demikian, 79,24 persen lahan di Kabupaten Gunungkidul dan 59,75 persen lahan di Kabupaten Kulonprogo merupakan lahan bukan sawah yang digunakan untuk pertanian.

Sebaliknya, sebanyak 97,48 persen atau 3.168 hektar lahan di Kota Yogyakarta digunakan sebagai lahan bukan pertanian. Hanya 2,52 persen (82 hektar) lahan di Kota Yogyakarta yang digunakan sebagai lahan pertanian. Laju konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah > 200 ha/tahun dan terjadi secara masif pada basis sawah produktif yang memproduksi beras sebagai bahan pangan pokok. Masalah konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi isu penting yang dapat mengganggu ketahanan pangan di DIY.

B. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh 89 (delapan puluh sembilan) PNS (BKPP DIY, Desember 2015).

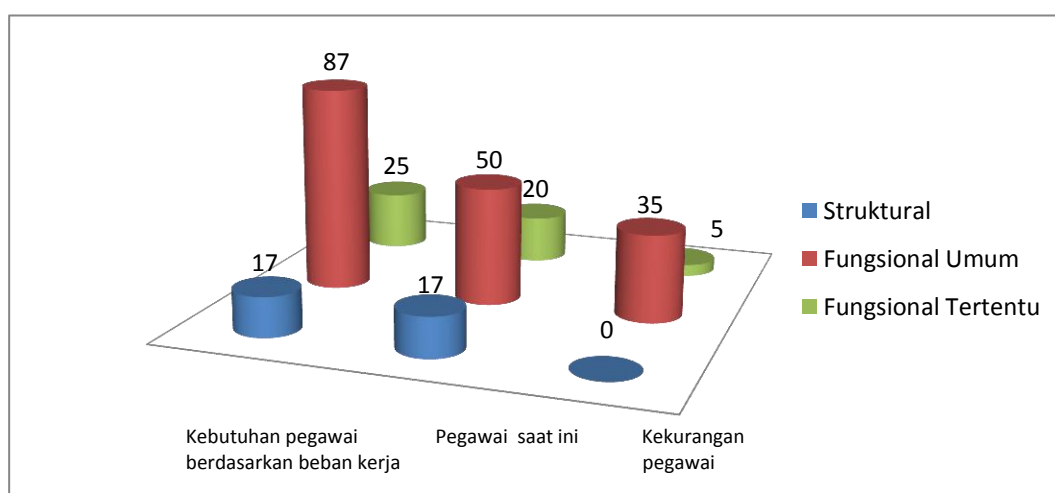
Tabel 1.2 Jenis Jabatan dan Formasi

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Formasi	Sudah Terisi	Belum Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	0	-
2.	Eselon III	5	5	0	
3.	Eselon IV	11	11	0	
4.	Fungsional Tertentu :				F. PUSAT
	a.Penyuluh Pertanian	8	6	2	BELUM ADA
	b.PMHP.	16	13	3	
	c. Penyuluh Perikanan	1	1	0	
	Jumlah	42	37	5	

Sumber : Kepegawaian BKPP Desember 2015

Tabel 1.3 Rincian Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
	11	48	-	2	27	1	-	89



Gambar 1.1
Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Sampai akhir tahun 2015 BKPP DIY mengalami defisit pegawai karena jumlah pegawai yang masuk (CPNS baru dan pindahan) lebih sedikit dibanding jumlah pegawai yang keluar (pensiun dan pindah tugas). Berdasarkan beban pekerjaan, dibutuhkan 130 pegawai agar tugas dan fungsi BKPP DIY dapat terlaksana dengan baik. Kondisi sampai Desember 2015 ada 89 (delapan puluh sembilan) pegawai sehingga masih kekurangan 41 pegawai.

Formasi jabatan struktural, mulai eselon II sampai dengan eselon IV sudah terisi semua sedangkan untuk formasi fungsional umum masih kekurangan 37 pegawai. Jabatan fungsional tertentu di BKPP ada dua, yaitu Penyuluh Pertanian/Perikanan yang masih kekurangan 2 pegawai dari 9 formasi yang ada dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) yang masih kekurangan 3 pegawai dari 16 formasi yang tersedia.

C. Dukungan Sarana Prasarana

Dari tahun ketahun keadaan sarana prasarana Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami perubahan karena adanya penghapusan sarana dan prasaran yang sudah tidak berfungsi maupun penambahan-penambahan hingga terwujud peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kelancaran operasionalnya. Kondisi sarana prasarana dapat dilihat pada lampiran 1.3 yang menunjukkan mengenai keadaan aset Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY berdasarkan aplikasi Online yang sudah di update oleh petugas.

D. Data Sub Sistem Ketersediaan Pangan

1. Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan (Demapan) adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara

berkelanjutan. Fasilitasi di Demapan sampai tahun 2015 (kumulatif) dapat dilihat di tabel di berikut ini:

Tabel. 1.4 Desa Mandiri Pangan di Fasilitasi

No	Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kulonprogo	-	2	9	1	1	14
2	Gunungkidul	1	4	9	2	2	16
3	Sleman	-	2	1	1	1	5
4	Bantul	3	4	5	2	-	8
Jumlah		4	12	24	6	4	43

Sumber: BKPP DIY, Desember 2015

2. Lumbung Pangan

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kelembagaan lumbung pangan secara berkelanjutan dilakukan melalui fasilitasi dan pembinaan di kelompok lumbung pangan dan Kelompok Wanita Tani. Sampai dengan akhir tahun 2015 sudah 50 kelompok lumbung pangan dan Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi, 50 kelompok difasilitasi melalui dana APBD dan 72 kelompok dari dana APBN. Fasilitasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pembangunan, pengisian, dan pengembangan.

Tabel 1.5 Lumbung Pangan yang di Fasilitasi

No	Kabupaten	APBN						APBD					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sleman	-	-	-	5	-	15	2	5	3	3	1	3
2	Gunung kidul	10	3	-	-	-	6	5	2	9	4	4	-
3	Bantul	1	4	-	-	-	-	2	2	3	4	4	2
4	Kulon progo	1	3	-	-	-	-	1	2	8	2	4	-
Jumlah		12	12	10	0	5	11	10	10	11	23	13	5

Sumber: BKPP DIY, Desember 2015

3. Cadangan Pangan

Cadangan pangan di masyarakat DIY berupa simpanan Gabah Kering Giling (GKG) di lumbung pangan kelompok. Cadangan pangan pemerintah DIY berupa beras yang disimpan di Gudang PUSKUD Metaram. Kondisi cadangan pangan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6. Tabel Cadangan Pangan DIY

Tahun	Cadangan Pangan Masyarakat (kg GKG)	Cadangan Pangan Pemerintah (kg beras)
2012	52.500	40.000
2013	30.000	43.250
2014	32.500	33.725
2015	70.000	191,536

Sumber: BKPP DIY, Desember 2015

E. Data Sub Sistem Distribusi Pangan

1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Pemberdayaan dan pengembangan LDPM sampai dengan tahun 2015 dilakukan dengan penumbuhan dan pemberian fasilitas kepada 102 gapoktan dengan macam pendekatan meliputi 52 gapoktan reguler dan 50 gapoktan bergulir.

2. Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)

Fasilitasi kelembagaan akses pangan LAPM dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan gapoktan yang diberi bantuan hibah. Hibah digunakan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat dengan harga yang murah. Kondisi lembaga akses pangan yang dibina BKPP sampai akhir tahun 2015 dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

- ❖ tahap penumbuhan = 6 gapoktan;

- ❖ tahap pengembangan = 11 gapoktan;
- ❖ tahap kemandirian = 11 gapoktan;
- ❖ tahap kemandirian I = 11 gapoktan;
- ❖ tahap kemandirian II = 5 gapoktan.
- ❖ tahap kemandirian III = 15 gapoktan

F. Data Sub Sistem Konsumsi

1. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dilaksanakan melalui fasilitasi terhadap Desa P2KP yang dilaksanakan mulai tahun 2010. Sampai tahun 2015 yang sudah terfasilitasi sebanyak 196 Desa P2KP.

2. Sertifikasi Prima dan Pendaftaran Nomor PSAT

Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY yang sebelumnya berkedudukan di Dinas Pertanian dan sejak tahun 2009 berkedudukan di BKPP berwenang melaksanakan penjaminan mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui kegiatan Sertifikasi Prima 2 dan Prima 3 serta Pendaftaran Nomor PSAT/Registrasi PD. Sampai tahun 2014 OKKPD DIY sudah menerbitkan 10 Sertifikat Prima 2, 40 Sertifikat Prima 3, dan 37 Nomor PSAT/PD.

Tabel 1.7 Jumlah sertifikasi yang diterbitkan

Jenis Sertifikat	Tahun									Jumlah
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Prima	1	3	4	1	5	8	7	10	11	50
PD	-	-	-	-	2	10	10	3	12	37

Sumber: BKPP DIY, Desember 2015

G. Data Penyuluhan

1. Penyuluh

Keragaan penyuluh PNS, penyuluh kontrak, dan penyuluh swadaya di sektor pertanian dan perikanan dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8 Keragaan Penyuluh Pertanian DIY Tahun 2015

NO	KABUPATEN/ KOTA	PENYULUH		THL	PPTK	Penyuluh Swadaya	
		Pertanian	Perikanan	TBPP		Pertanian	Perikanan
1	SLEMAN	74	16	53	5	60	35
2	BANTUL	49	11	67	3	153	65
3	KULONPROGO	51	13	63	3	111	59
4	GUNUNGKIDUL	73	6	42	6	144	65
5	KOTA	7	0	8	3	15	1
6	PROVINSI	8	0	0	0	0	0
7	BPTP	16	0	0	0	0	0
JUMLAH		278	46	233	20	483	225

Sumber: BKPP DIY, Desember 2015

2. Pelaku Usaha/Pelaku Utama

Tabel 1.9 Keragaan Pelaku Usaha/Pelaku Utama di DIY Tahun 2015

KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA	SLEMAN	GUNUNG KIDUL	BANTUL	KULON PROGO	KOTA YOGYA	JUMLAH
Kelompok Tani	2.321	1.673	818	1.058	194	6.064
GAPOKTAN	86	144	75	88	45	438
Pokdakan	569	427	379	359	39	1.773
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA	SLEMAN	GUNUNG KIDUL	BANTUL	KULON PROGO	KOTA YOGYA	JUMLAH
UP FMA	-	40	75	80	-	195
Asosiasi	16	8	3	12	4	43

Sumber: BKPP DIY, Desember 2015

H. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Ada 4 (empat) jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang harus dipenuhi oleh BKPP DIY, yaitu: ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Target dan pencapaiannya mulai tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut ini.

Tabel 1.10 Target dan Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan 2012-2015

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Umum			Standar Pelayanan Minimal Daerah							
		Indikator	Target	Batas Akhir Capaian	Target 2012	Capaian 2012	Target 2013	Capaian 2013	Target 2014	Capaian 2014	Target 2015	Capaian 2015
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan cadangan pangan	60%	2015	37,50%	35%	45,00%	56,56%	52%	73,42%	60%	95,77%
2.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100%	2015	94,26%	94,26%	96,87%	92,19%	99,15%	99,15%	100%	100%
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	2015	73%	73%	75,50%	100%	78%	100%	80%	100%
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	60%	2015	45%	46%	50,00%	56,25%	50%	100%	60%	190%

5. Sistematika Penulisan

Renja BKPP tahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, data dan informasi serta sistematika penulisan;

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan capaian Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPP, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, visi, misi, tujuan, dan sasaran SKPD serta program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB IV. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Jumlah program yang dibiayai dari dana APBD tahun anggaran 2015 sebanyak 9 (sembilan) program yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) kegiatan. Kegiatan fisik di BKPP DIY tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan sesuai target dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi fisik dari Belanja Tidak Langsung mencapai 100%;
- b. Realisasi fisik dari Belanja Langsung mencapai 100%.

Serapan anggaran dari dana APBD tahun 2015 untuk Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Gaji dan Tunjangan untuk pegawai sebesar **Rp.5.098.168.098** (.Lima Milyar sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar **97,61%** dari **Rp. 5.223.150.716**. Sisa anggaran sebesar Rp.**124.982.618** (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah). Realisasi Belanja Langsung sebesar **Rp. 6.386.927.847** (enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 93,64% **dari Rp. 7.301.573.450** (Jadi sisa anggaran sebesar Rp. **464.645.603,-** (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima enam ratus tiga rupiah) disetor kembali ke kas daerah sebagai efisiensi.

Capaian realisasi fisik dan keuangan dari APBD pada tahun 2015 dapat digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun 2015
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kode Rekening	URAIAN KEGIATAN	PAGU STLH PERUBAHAN	Fisik		Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Deviasi (%)
		BELANJA	12.524.724.166	100%	100%	12.524.724.166	100%	11.935.095.945	4,71%
	5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.223.150.716	100%	100%	5.223.150.716	100%	5.098.168.098	2,39%
	5.1.1.	Belanja Pegawai	5.223.150.716	100%	100%	5.223.150.716	100%	5.098.168.098	2,39%
	5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	5.223.150.716	100%	100%	5.223.150.716	100%	5.098.168.098	2,39%
	5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.301.573.450	100%	100%	7.301.573.450	100%	6.386.927.847	6,36%
1	1.21.1.21.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	563.813.900	100%	100%	563.813.900	100%	510.887.157	9,39%
1.1	1.21.1.21.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000	100%	100%	250.000	100%	107.500	57,00%
1.2	1.21.1.21.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	193.200.000	100%	100%	193.200.000	100%	163.821.241	15,21%
1.3	1.21.1.21.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.140.000	100%	100%	6.140.000	100%	6.127.000	0,21%
1.4	1.21.1.21.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.746.600	100%	100%	22.746.600	100%	22.131.000	2,71%
1.5	1.21.1.21.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	74.950.000	100%	100%	74.950.000	100%	74.290.000	0,88%
1.6	1.21.1.21.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.748.300	100%	100%	32.748.300	100%	32.298.300	1,37%

No	Kode Rekening	URAIAN KEGIATAN	PAGU STLH PERUBAHAN	Fisik		Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Deviasi (%)
1.7	1.21.1.21.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.000	100%	100%	24.999.000	100%	23.028.100	7,88%
1.8	1.21.1.21.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	100%	100%	15.000.000	100%	14.986.000	0,09%
1.9	1.21.1.21.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	9.780.000	100%	100%	9.780.000	100%	7.246.000	25,91%
1.10	1.21.1.21.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	25.000.000	100%	100%	25.000.000	100%	24.970.000	0,12%
1.11	1.21.1.21.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150.000.000	100%	100%	150.000.000	100%	132.882.016	11,41%
1.12	1.21.1.21.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	9.000.000	100%	100%	9.000.000	100%	9.000.000	0,00%
2	1.21.1.21.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.413.500.000	100%	100%	1.413.500.000	100%	1.340.631.625	5,16%
2.1	1.21.1.21.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	496.000.000	100%	100%	496.000.000	100%	485.401.000	2,14%
2.2	1.21.1.21.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	420.000.000	100%	100%	420.000.000	100%	390.930.000	6,92%
2.3	1.21.1.21.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	200.000.000	100%	100%	200.000.000	100%	199.180.000	0,41%
2.4	1.21.1.21.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	100.000.000	100%	100%	100.000.000	100%	94.792.000	5,21%
2.5	1.21.1.21.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	175.000.000	100%	100%	175.000.000	100%	147.828.625	15,53%
2.6	1.21.1.21.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.500.000	100%	100%	4.500.000	100%	4.500.000	0,00%

No	Kode Rekening	URAIAN KEGIATAN	PAGU STLH PERUBAHAN	Fisik		Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Deviasi (%)
2.7	1.21.1.21.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.000.000	100%	100%	18.000.000	100%	18.000.000	0,00%
3	1.21.1.21.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	36.600.000	100%	100%	36.600.000	100%	34.170.175	6,64%
3.1	1.21.1.21.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.600.000	100%	100%	12.600.000	100%	12.571.125	0,23%
3.2	1.21.1.21.01.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	24.000.000	100%	100%	24.000.000	100%	21.599.050	10,00%
4	1.21.1.21.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	202.000.000	100%	100%	202.000.000	100%	198.826.600	1,57%
4.1	1.21.1.21.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	6.000.000	100%	100%	6.000.000	100%	5.950.000	0,83%
4.2	1.21.1.21.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	8.000.000	100%	100%	8.000.000	100%	7.954.000	0,58%
4.3	1.21.1.21.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	165.000.000	100%	100%	165.000.000	100%	161.932.800	1,86%
4.4	1.21.1.21.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	23.000.000	100%	100%	23.000.000	100%	22.989.800	0,04%
5	1.21.1.21.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN	1.132.000.000	100%	100%	1.132.000.000	100%	1.032.599.400	8,78%
5.1	1.21.1.21.01.15.006	Peningkatan Kompetensi Dan Keprofesian Tenaga Penyuluh	600.000.000	100%	100%	600.000.000	100%	557.015.500	7,16%

No	Kode Rekening	URAIAN KEGIATAN	PAGU STLH PERUBAHAN	Fisik		Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Deviasi (%)
5.2	1.21.1.21.01.15.010	Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta	70.000.000	100%	100%	70.000.000	100%	60.846.600	13,08%
5.3	1.21.1.21.01.15.011	Penyusunan Program Penyuluhan	37.000.000	100%	100%	37.000.000	100%	34.216.000	7,52%
5.4	1.21.1.21.01.15.014	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan	425.000.000	100%	100%	425.000.000	100%	380.521.300	10,47%
6	1.21.1.21.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	1.338.189.050	100%	100%	1.338.189.050	100%	1.262.257.875	5,67%
6.1	1.21.1.21.01.17.001	Dukungan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	287.470.000	100%	100%	287.470.000	100%	273.379.875	4,90%
6.2	1.21.1.21.01.17.002	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	900.719.050	100%	100%	900.719.050	100%	861.345.900	4,37%
6.3	1.21.1.21.01.17.003	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA	80.000.000	100%	100%	80.000.000	100%	62.537.000	21,83%
6.4	1.21.1.21.01.17.004	Penyusunan SKPG	70.000.000	100%	100%	70.000.000	100%	64.995.100	7,15%
7	1.21.1.21.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN	764.874.000	100%	100%	764.874.000	100%	712.629.865	6,83%
7.1	1.21.1.21.01.18.001	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	70.000.000	100%	100%	70.000.000	100%	69.900.000	0,14%
7.2	1.21.1.21.01.18.002	Penguatan Cadangan Pangan	544.874.000	100%	100%	544.874.000	100%	494.468.265	9,25%
7.3	1.21.1.21.01.18.003	Analisis Ketersediaan Pangan	100.000.000	100%	100%	100.000.000	100%	98.461.600	1,54%
7.4	1.21.1.21.01.18.004	Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	50.000.000	100%	100%	50.000.000	100%	49.800.000	0,40%
8	1.21.1.21.01.19.	PROGRAM	1.240.596.500	100%	100%	1.240.596.500	100%	1.175.931.	5,21%

No	Kode Rekening	URAIAN KEGIATAN	PAGU STLH PERUBAHAN	Fisik		Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Deviasi (%)
		PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN						500	
8.1	1.21.1.21.01.19.001	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman	109.250.000	100%	100%	109.250.000	100%	107.397.800	1,70%
8.2	1.21.1.21.01.19.002	Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal	200.000.000	100%	100%	200.000.000	100%	186.207.000	6,90%
8.3	1.21.1.21.01.19.003	Pengembangan Diversifikasi Produk Antara	119.000.000	100%	100%	119.000.000	100%	118.098.000	0,76%
8.4	1.21.1.21.01.19.004	Penanganan Keamanan Pangan	250.000.000	100%	100%	250.000.000	100%	247.352.000	1,06%
8.5	1.21.1.21.01.19.005	Pengembangan Kelembagaan OKKPD	60.000.000	100%	100%	60.000.000	100%	59.000.000	1,67%
8.6	1.21.1.21.01.19.006	Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan	39.950.000	100%	100%	39.950.000	100%	38.030.450	4,80%
8.7	1.21.1.21.01.19.007	Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar	375.000.000	100%	100%	375.000.000	100%	333.976.000	10,94%
8.8	1.21.1.21.01.19.008	Dukungan Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat	55.000.000	100%	100%	55.000.000	100%	54.410.000	1,07%
8.9	1.21.1.21.01.19.009	Penyusunan PPH	32.396.500	100%	100%	32.396.500	100%	31.460.250	2,89%
9	1.21.1.21.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN	610.000.000	100%	100%	610.000.000	100%	568.993.650	6,72%
9.1	1.21.1.21.01.20.001	Dukungan Kelembagaan Akses Pangan	250.000.000		100%	250.000.000	100%	224.633.000	10,15%
9.2	1.21.1.21.01.20.002	Analisis Distribusi dan Harga Pangan	80.000.000		100%	80.000.000	100%	76.659.000	4,18%
9.3	1.21.1.21.01.20.003	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga	165.000.000		100%	165.000.000	100%	158.075.000	4,20%

No	Kode Rekening	URAIAN KEGIATAN	PAGU STLH PERUBAHAN	Fisik		Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Deviasi (%)
		Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)							
9.4	1.21.1.21.01.20.004	Analisis Pasokan dan Akses Pangan	100.000.000		100%	100.000.000	100%	95.146.650	4,85%
9.5	1.21.1.21.01.20.005	Pengembangan/Pengadaan Software Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan	15.000.000		100%	15.000.000	100%	14.480.000	3,47%
Jumlah									

Dari capaian keuangan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sisa anggarannya melebihi 10%.

A. Nama kegiatan dengan sisa anggaran lebih dari 10%:

1. Penyediaan Jasa Surat 57,00%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 15,21%
3. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 25,91%
4. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 11,41%
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15,53%
6. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan 10,47%
7. Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta 13,08%
8. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA 21,83%
9. Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar 10,94%

B. Penjelasan terhadap pekerjaan yang sisa anggarannya lebih dari 10%:

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat sesungguhnya mempunyai nilai nominal yang sangat kecil yaitu Rp.250.000,00 tetapi hanya terserap setengahnya. Hal ini disebabkan penggunaan jasa kirim surat sudah berkurang dan lebih mengandalkan surat elektronik dan faximili.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik: kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan telepon tidak sesuai dengan yang direncanakan; disebabkan oleh adanya efisiensi

penggunakan sumberdaya air, listrik dan biaya telepon yang banyak dialihkan menggunakan internet/email, atau telepon pribadi.

3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi target dikarenakan terbatasnya produk hukum terkait dengan ketahanan pangan yang digandakan atau dibeli, sementara prediksi kenaikan langganan tidak sebesar perhitungan perencanaan
4. Perjalanan ke luar daerah dan konsultasi dilakukan dengan prinsip efisiensi anggaran untukantisipasi koordinasi akhir tahun (pasif menunggu jika ada undangan dari pihak luar), tetapi ternyata sisa 10%.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional: banyak kendaraan dinas operasional yang masih relatif baru dan belum memerlukan perawatan serta penggantian suku cadang, efisiensi penggunaan BBM sesuai kebutuhan
6. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan 10,47%; merupakan efisiensi karena penyesuaian harga satuan dengan SHBJ.
7. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan 13% adalah adanya: efisiensi karena perjalanan luar daerah untuk lomba kelompok perikanan dan kelautan tingkat nasional ditanggung oleh pusat serta adanya penyesuaian harga satuan dengan SHBJ.
8. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA; dari realisasi Fisik, bimtek FSVA untuk kota Yogyakarta tidak dilaksanakan karena dari Pusat tidak ada Pedum Penyusunan FSVA 2015 untuk tingkat Kota. Dari realisasi keuangan yaitu adanya efisiensi anggaran bimtek FSVA tingkat kota.

9. Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar 10,94% dari realisasi Keuangan disebabkan adanya efisiensi belanja analisis laboratorium.

1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY selain ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama berupa Skor Pola Pangan Harapan (PPH), juga ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK).

Pada tahun anggaran 2015, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY telah berhasil mengemban tugas dan menyelesaikan kewajiban pengelolaan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran target kinerja atas indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2014			2015		
			Target	Capaian	% Realisasi	Target	Capaian	% Realisasi
1	Ketersediaan energi	Kkal/kap/hr	3.511	3.699	105,35	3.511	3.701	105,41
	Ketersediaan protein	Gr/kap/hr	90,83	107,3	118,13	90,83	111,71	122,99
	Cadangan pangan	Ton beras	290	290	100,00	360	360	100,00
2	Penurunan Daerah Rawan Pangan	Desa	62	26	158,06	53	20	162,26
3	SKOR PPH *		81,9	85,3	104,15	84,6	85,3	100,83

4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	78	100	128,21	80	100	125,00
5	Distribusi, harga, dan akses pangan	Unit Gapoktan	28	28	100,00	30	30	100,00
6	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	%	99,15	99,15	100,00	100	100	100,00
7	Peningkatan kapasitas penyuluh	%	61	61	100,00	74	74	100,00
8	Peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaku utama	Orang	300	300	100,00	450	450	100,00

Sumber : BKPP DIY 2015

Ket* : Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY

Indikator Kinerja Utama Gubernur DIY untuk BKPP adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, sasaran Skor PPH nasional tahun 2014 sebesar 93,3. Kemudian berdasarkan Renstra Kementan 2015-2019 skor PPH nasional di target pada 84,1. Skor PPH di DIY tahun 2014 sebesar 85,3 (menggunakan angka perhitungan PPH tahun 2013 dikarenakan data SUSENAS yang dipakai sebagai dasar penghitungan Skor PPH 2014 baru keluar setelah pertengahan tahun 2015), memang masih lebih rendah dibanding target nasional tetapi sudah meningkat dari Skor PPH DIY tahun 2013 sebesar 83,1 dan sudah melebihi target tahun 2014 dengan persentase capaian 104,15%. Sementara capaian PPH DIY tahun 2015 sebesar 85,3 sesuai dengan target yang ditetapkan, skor tersebut telah melebihi target Nasional sebesar 84,1.

Terlihat di tabel 2.2, ada 10 (sepuluh) indikator yang terbagi ke dalam 8 (delapan) sasaran strategis. Pada tahun 2015, semua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan capaian indikator Ketersediaan Energi, Ketersediaan Protein, Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH), serta Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan realisasinya terhadap target melebihi 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan antara BKPP DIY dengan SKPD pengampu ketahanan pangan dan penyuluhan tingkat kabupaten/kota berjalan dengan baik. Adanya sinergitas anggaran untuk mendukung berbagai program/kegiatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota terlaksana tanpa hambatan yang berarti karena kabupaten/kota ikut menganggarkan dana APBD kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dari BKPP DIY. Demikian pula hubungan koordinasi dan sinergi program/kegiatan antara BKPP DIY dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, dan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berjalan dengan baik. BKPP DIY memperoleh dukungan dana APBN untuk berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY sejauh ini telah berhasil mengemban tugas dan menyelesaikan kewajiban pengelolaan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya adalah:

1. Jumlah penduduk miskin di DIY masih cukup tinggi. Hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, termasuk untuk mendapatkan bahan pangan sehingga berpotensi menimbulkan kondisi rawan pangan dan gizi buruk.
2. Kondisi ketersediaan bahan pangan mulai dari hulu sampai hilir (produsen sampai dengan konsumen akhir) di DIY belum ada gambaran yang jelas sehingga kadang kala menyulitkan proses penelusuran saat terjadi kelangkaan bahan pangan yang menimbulkan kenaikan harga, tidak dapat diketahui pasti di titik atau tingkatan mana terjadi permasalahan. Hal ini sering kali

mengakibatkan kebijakan yang diambil kurang tepat dan kurang bisa menyelesaikan masalah.

3. Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta masih sangat tergantungnya pola konsumsi rumah tangga hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengkonsumsi dan memproduksi makanan yang aman, bermutu, halal, dan bermartabat.
5. Kurang mantapnya kelembagaan penyuluhan dan sinergisitas pelaku penyuluhan.

Berbagai permasalahan tersebut berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi Gubernur DIY yang terurai dalam Indikator Kinerja Utama Gubernur DIY maupun dalam sasaran strategis dan indikator kinerja di Renstra BKPP DIY. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui upaya-upaya berikut:

1. Untuk mengurangi ketergantungan pola konsumsi rumah tangga hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu maka, perlu:
 - a. Meningkatkan kemampuan, pelaksanaan gerakan, sosialisasi, promosi, dan kampanye makan B2SA.
 - b. Meningkatkan/mengintensifkan kemampuan, pelaksanaan gerakan, sosialisasi, promosi, dan kampanye makan B2SA.
 - c. Mendorong terwujudnya gerakan *one day no rice* (satu hari tanpa mengkonsumsi nasi).
 - d. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga serta memperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini dalam usaha untuk memproduksi bahan pangan sendiri melalui penanaman tanaman pangan di pekarangan dengan

mengadakan sosialisasi tentang konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kepada siswa-siswa Sekolah Dasar di DIY.

- e. Mengenalkan dan mengembangkan teknologi pengolahan pangan lokal melalui Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L).
 - f. Mempromosikan program Pemerintah yaitu Toko Tani Indonesia (TTI) yaitu kegiatan berupa Optimalisasi Pemanfaatan pasokan dan harga pangan pokok, dengan tujuan:
 1. Menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis,
 2. Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis,
 3. Memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis, dengan harga yang terjangkau dan murah untuk memberi nilai tambah pada pekarangan dengan memanfaatkannya sebagai sumber pangan keluarga.
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi makanan yang aman, bermutu, halal, dan bermartabat, maka perlu:
- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman rumah tangga tentang manfaat pangan lokal.
 - b. Mendorong peningkatan status pangan lokal sesuai dengan perkembangan preferensi konsumen.
 - c. Meningkatkan pemasyarakatan tentang pentingnya keamanan pangan melalui jejaring keamanan pangan secara terpadu.
 - d. Meningkatkan pengawasan pangan yang beredar di masyarakat secara mandiri maupun kerjasama melalui jejaring keamanan pangan terpadu.

- e. Meningkatkan sosialisasi penggunaan produk pangan bersertifikat.
 - f. Membantu menyediakan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang sehat dan aman melalui penerbitan Sertifikat Prima dan Nomor PSAT oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY.
3. Untuk memantapkan kelembagaan penyuluhan dilakukan melalui revitalisasi BPP yang didanai melalui APBN sedangkan untuk meningkatkan peran penyuluh terutama dalam mendukung swasembada padi, jagung, dan kedelai melalui pelatihan/bimtek/peningkatan kompetensi/kapasitas penyuluh PNS, kontrak maupun swadaya. Selain itu, upaya khusus swasembada pangan juga didukung melalui pendampingan mahasiswa maupun bintara pembina desa (babinsa) dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Keberhasilan penyuluhan juga sangat ditunjang oleh koordinasi dan sinergitas yang baik antar para pihak terkait.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Desa Rawan Pangan sebanyak 20 desa tersebar di empat kabupaten dan jumlah penduduk miskin di DIY sebesar 14,91 % (BPS, 2015);
- b. Adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam hal pendapatan penduduk kelompok kaya dan miskin yang tercermin dalam Indeks Gini 0,47 (BPS, 2015).
- c. Fakta bahwa jumlah penduduk terus bertambah, perubahan iklim global, konversi/alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat, bencana alam sering terjadi, perkembangan ekonomi dan perdagangan global, perkembangan geoekonomi dan krisis ekonomi global secara riil semuanya mengancam ketahanan pangan;

- d. Hasil riset dan teknologi di bidang pertanian dan pangan berbasis pada sumberdaya lokal belum mampu menjawab permasalahan penyediaan pangan (segar dan olahan);
- e. Kuantitas sumber daya manusia di sektor pertanian yang semakin menurun dengan kemampuan (kualitas) yang cenderung stagnan sehingga kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kondisi global.

Berbagai program aksi yang sedang dan akan dilaksanakan dalam menjawab berbagai tantangan tersebut adalah:

- a. Penumbuhan dan pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan);
- b. Penumbuhan dan pengembangan pengelolaan cadangan pangan;
- c. Fasilitasi bantuan penanganan daerah rawan pangan (*transient*);
- d. Pemantapan rekomendasi kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang didasarkan pada perhitungan Neraca Bahan Makanan di DIY;
- e. Penumbuhan dan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- f. Penumbuhan dan pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM);
- g. Pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan;
- h. Penumbuhan dan pengembangan desa P2KP;
- i. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal/nusantara;
- j. Peningkatan pengawasan dan penjaminan mutu produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- k. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan;

- l. Pemantapan penyelenggaraan penyuluhan (program aksi Kementan, UP-FMA), ketenagaan (fasilitasi PP PNS, THL-TB PP dan PP Swadaya), dan kelembagaan (BPP dan Posluhdes).
- m. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- n. Pemantapan fasilitasi dukungan pengelolaan administrasi dan manajemen serta kelembagaan non struktural di lingkup BKPP.

4. Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan untuk menyusun kegiatan tahun 2017 yaitu:

- a. Usulan kegiatan dijabarkan dan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan);
- b. Hasil Musrenbangtan disampaikan kepada TAPD dalam Forum SKPD yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaannya;
- c. Hasil forum SKPD ditindaklanjuti dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang akan menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Gubernur menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD;
- e. Berdasarkan KUA Pemerintah Daerah menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- f. Berdasarkan KUA dan PPAS Kepala Badan menyusun RKA-SKPD;
- g. Penyusunan RKA-SKPD memperhatikan capaian tahun sebelumnya, usulan dan masukan dari kabupaten kota dan

asumsi-asumsi tahun berikutnya serta mempertimbangkan SHBJ dan ASB.

- h. Pencermatan terhadap RKA-SKPD dilakukan oleh TAPD, selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi B dan Badan Anggaran).
- i. Dilakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur.

Dari rancangan awal yang telah disusun dalam RKPD 2017 telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahun 2015 Renstra BKPP DIY sudah ditinjau kembali menyesuaikan dengan hasil Perubahan atas RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Dari 8 (delapan) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja menjadi 2 (dua) sasaran strategis (sesuai dengan sasaran SKPD yang tercantum dalam Perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017) dengan 2 (dua) indikator kinerja. Untuk indikator kinerja utama masih tetap Skor

Pola Pangan Harapan (PPH), targetnya saja yang ditingkatkan menjadi 88,5 (tahun 2016) dan pada tahun 2017 terjadi penurunan angka target PPH menjadi 84,30, hal ini disebabkan oleh pengurangan komoditas yang semula 207 jenis pangan dan 35 jenis makanan menjadi 111 pangan dan 35 makanan oleh BPS dengan alasan untuk memudahkan pelaksanaan survey. Komoditas Pangan dan Makanan itu menjadi dasar perhitungan data PPH.

Dibandingkan dengan Renstra BKPP, ada sedikit perubahan dalam rancangan awal RKPD. Perubahan tersebut terletak pada besarnya anggaran yang akan digunakan. Sebagian besar mengalami kenaikan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan yang bersangkutan agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Rumusan program dan kegiatan yang termuat dalam rancangan awal RKPD 2017 secara keseluruhan sudah sesuai dengan rumusan program dan kegiatan yang direncanakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY terutama sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian sasaran tahun 2015 agar target kinerja akhir RPJMD maupun Renstra BKPP DIY di tahun 2017 dapat dicapai secara bertahap.

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja BKPP DIY dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan ketahanan pangan dan pendekatan usulan program/kegiatan dari atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah. Forum untuk menjaring aspirasi masyarakat dan usulan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dari kalangan non pemerintah dilakukan melalui forum resmi seperti dalam pelaksanaan musrenbang dan melalui forum tidak resmi.

Aspirasi dan usulan tersebut diterima oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian dilakukan kajian lebih lanjut mengenai keterkaitan usulan kegiatan dengan arah pembangunan ketahanan pangan seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY serta keterkaitan dengan isu-isu penting pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi agenda 7.1. NAWACITA yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda **Peningkatan Kedaulatan Pangan**. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional, dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit* (WFS) 1996.

Tindak lanjut dari MDGs adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs dideklarasikan pada 25 September 2015 dalam Sidang PBB di New York, Indonesia dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden. Kementerian Pertanian Khususnya Ketahanan Pangan berperan dalam mencapai Tujuan tujuan SDGs diantaranya : Tujuan ke-2 Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan gizi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan, serta Tujuan ke 12 : Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan. SDGs belum dapat menjadi acuan perencanaan karena di DIY belum ada penetapan payung hukum sebagai dasar implementasinya.

Dengan mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT Pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2015-2019 adalah *pilot project* 1000 desa organik (bagian reforma agraria) hingga tahun 2019 dan bertambah 1000 desa lagi hingga tahun 2024, melalui: (1) meningkatkan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga

dan cadangan pangan, serta (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (b) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis; (c) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitas harga dan cadangan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (c) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan (d) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, (b) teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, (c) meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar, dan (d) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektoral dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan segar.

Pemerintah Pusat melalui Badan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian juga memberikan komitmen yang kuat untuk pembangunan penyuluhan di daerah. Komitmen ini akan diwujudkan melalui program Revitalisasi BPP dan program 1 Desa 1 Penyuluh untuk

mendukung berjalannya sistem penyuluhan yang produktif, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain: (a) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (b) peningkatan kerjasama internasional, (c) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (d) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (e) dorongan terciptanya makro dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Berdasarkan kebijakan ketahanan pangan nasional Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, akan memadukan antara prinsip *top-down policy* dan prinsip *bottom-up planning* dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, dalam proses ini mesti diperhatikan apa yang ingin dicapai Pemerintah Pusat dan apa kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, agar tujuan yang akan dicapai sesuai dengan harapan.

2. Visi dan Misi

A. Visi

Pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan diarahkan pada terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, aman, dan terjangkau serta berkelanjutan yang didukung oleh penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan visi. Adapun visi tersebut adalah:

“Mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, berkarakter dan berbudaya secara berkelanjutan melalui tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan didukung oleh sistem penyuluhan yang efektif dan efisien”.

B. Misi

Misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan ketahanan pangan dengan peningkatan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;

Misi 2. Pengembangan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sesuai karakter, budaya lokal dan kebutuhan petani, nelayan dan masyarakat sekitar kawasan hutan;

Misi 3. Pengembangan sistem pengelolaan ketahanan pangan dan penyuluhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance).

3. Tujuan dan Sasaran SKPD

A. Tujuan

Tujuan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pada hakekatnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat individu, rumah tangga dan wilayah serta penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien. Memperhatikan visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) minimal 84,3 di tahun 2017;

2. Meningkatkan kinerja tenaga penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan masyarakat petani dan nelayan serta masyarakat sekitar kawasan hutan;
3. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.

B. Sasaran

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan, maka pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan pada pencapaian sasaran:

1. Pemantapan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat yaitu pada posisi skor PPH 84,30;
2. Peningkatan kualitas penyuluh dan peningkatan kualitas kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha sampai 100%;
3. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD sampai dengan 100%.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2016-2017 (Setelah Review Renstra BKPP DIY 2012-2017)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Tahun	
			2016	2017
Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) minimal 84,30	Pemantapan Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,5	84,30

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Tahun	
			2016	2017
di tahun 2017				
Meningkatkan kinerja tenaga penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan masyarakat petani dan nelayan serta masyarakat sekitar kawasan hutan	Peningkatan kualitas penyuluh dan peningkatan kualitas kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha	Persentase jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya	87%	100%
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif	Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100%	100%

Sumber: Review Renstra 2012-2017

4. Program dan Kegiatan

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. BKPP DIY mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan serta

koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, BKPP DIY ikut serta mendukung pencapaian visi Gubernur DIY yang termuat dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” melalui misi ke-1 yaitu membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan misi ke-2 yaitu menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.

Selain itu BKPP DIY mendukung pula pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang memenuhi kaidah Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui skor PPH. Pencapaian tujuan pertama *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dan dilanjutkan Tujuan ke-2 dan ke-12 SDGs, meskipun secara *de jure* SDGs belum ada payung hukum untuk diterapkan di DIY, namun secara esensi hal itu juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan BKPP DIY tahun 2017 di samping pendayagunaan potensi ekonomi DIY seperti kearifan lokal lumbung pangan, potensi pangan lokal, maupun produk makanan lokal.

Pada tahun 2017, BKPP DIY merumuskan rencana program dan kegiatan sejumlah 10 (sepuluh) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Lokasi sasaran program dan kegiatan tersebar di 4 kabupaten/1 kota di DIY termasuk di lingkup BKPP DIY. Ada 4 program yaitu program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terfokus pada internal BKPP DIY. Sedangkan 5 program lainnya yaitu:

1. Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan;
2. Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan;

3. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan;
5. Pemberdayaan Penyuluhan.

Satu program bersumber Dana Keistimewaan yaitu : Program Pengembangan Industri Kecil dengan Program Pengembangan Kuliner Khas Yogyakarta

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif belanja langsung yang bersumber dari dana APBD DIY untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan BKPP DIY pada tahun 2017 seperti yang tercantum dalam Jogjaplan tahun 2017 sebesar Rp. 8.717.286.800,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh enam delapan ratus rupiah), terdiri dari belanja Non Keistimewaan Rp. 7.637.273.900,00 dan Dana Keistimewaan :Rp.500.000.000,00. Usulan belanja bantuan kelembagaan/bantuan hibah yang akan disalurkan ke masyarakat untuk kegiatan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan, Penguatan Cadangan Pangan, Dukungan Kelembagaan Akses Pangan, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. Sasaran untuk masing-masing program/kegiatan BKPP disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu. Rincian program dan kegiatan berikut kebutuhan dana/pagu indikatif per kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang ada, tahun 2017 BKPP DIY melanjutkan kegiatan tahun 2015 melalui Gerakan Percepatan Penanganan 8 Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 434/KEP/2012 tanggal 28 Desember 2010 merupakan program Arahan Gubernur DIY (selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan) yang dicanangkan secara sinergis antar SKPD terkait dan *stakeholder* lainnya. Pelaksanaannya dimulai tahun 2013 sampai dengan 2016. Sampai tahun 2014, dari 8 Desa Percontohan masih ada 2 desa yang masuk kriteria desa rawan pangan yaitu desa Jagalan dan Hargorejo. Untuk tingkat

kemiskinannya walaupun sudah ada penurunan tetapi belum signifikan sehingga tahun 2017 ini masih dijadikan kegiatan unggulan melalui Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan bersama dengan desa-desa rawan pangan lainnya yang tersebar di 4 Kabupaten se-DIY. Lokasi 8 Desa Percontohan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Delapan Desa Percontohan

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	Kulonprogo	Kokap	Hargorejo
2		Samigaluh	Pagerharjo
3	Gunungkidul	Semanu	Dadapayu
4		Semin	Pundungsari
5	Bantul	Banguntapan	Jagalan
6		Kasih	Tamantirto
7	Sleman	Prambanan	Wukirharjo
8		Seyegan	Margoagung

Perdagangan bebas antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 akan mengetatkan persaingan barang konsumsi, utamanya yang berakar dari sektor pertanian. Untuk menghindarkan “bencana impor” produk pertanian segar dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing produk melalui keamanan pangan dan penjaminan mutu produk. Oleh karena itu, kegiatan yang terkait dengan penanganan keamanan pangan dan sertifikasi produk pertanian segar maupun olahan mendapat prioritas anggaran yang lebih besar.

Sedangkan untuk menghadapi serangan produk olahan dan untuk menurunkan ketergantungan terhadap terigu yang seluruhnya impor dapat dilakukan melalui diversifikasi pangan berbasis produk lokal menjadi bentuk yang lebih mudah disimpan, siap diolah dan dikonsumsi, tersedia kapan dan dimana saja (tidak ada masalah dengan akses), dan

kandungan gizinya tidak kalah dari terigu. Oleh karena itu, tahun 2017 ini Pengembangan Diversifikasi Produk Antara yang mengarah pada Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal atau sekarang lebih dikenal sebagai Model Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal (MP3L) untuk menghasilkan pangan pokok non beras dan non terigu berbahan dasar lokal di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul juga dijadikan kegiatan unggulan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam indikator kinerja, BKPP tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan peran serta dari para pihak terkait. Contohnya dalam penanganan 8 Desa Percontohan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Sistem Keamanan Pangan Terpadu, dan penyimpanan cadangan pangan pemerintah.

Pihak-pihak yang selama ini sudah bekerjasama dengan BKPP terdiri dari instansi vertikal di Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD lingkup provinsi DIY (Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dll), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Bulog, Badan Pusat Statistik, SKPD Kabupaten/Kota yang mengampu ketahanan pangan dan penyuluhan, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) juga berperan memberikan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan maupun pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Rencana Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Non Keistimewaan DIY

No	Nama Program	Target Kinerja	Kegiatan	Kegiatan 2017	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Rp 471.475.700	Rp 513.370.000	Alat Tulis Kantor 53 Jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%
						Barang cetakan 10 macam blangko cetakan	-
						Barang penggandaan 60.000 lembar	-
						Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 tepat waktu 18 unit	-
						Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu 6 unit	-
						Bukti pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah 12 kuitansi	-
						Buku Mengenai Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Perundangan, TI, dan Pengetahuan Umum 1 paket	-
						Kebersihan gedung kantor seluas 54.967 M2	-
						Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17 Jenis	-
						Majalah 2 Jenis (12 bulan)	-
						Pembayaran belanja internet 1 saluran 12 bulan	-
						Pembayaran belanja listrik 4 KWH meter 12 bulan	-
						Pembayaran belanja telepon 4 saluran 12 bulan	-

No	Nama Program	Target Kinerja	Kegiatan	Kegiatan 2017	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
						Pengiriman dokumen 500 surat	-
						Surat Kabar 4 Jenis (12 bulan)	-
						Surat keluar 500 surat	-
						Surat masuk 750 surat	-
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Rp 145.724.300	Rp 151.500.000	Bukti Bayar Honorarium Pengelola Barang 2 Orang (12 Bulan)	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%
						Bukti Bayar Honorarium Pengelola Kepegawaian 2 Orang (12 Bulan)	-
						Bukti Bayar Honorarium Pengelola Keuangan 6 Orang (12 Bulan)	-
						Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja 12 kuitansi	-
3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Rp 224.800.000	Rp 242.000.000	Koordinasi dalam daerah 12 bulan	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%
						Koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan	-
						Makanan dan minuman sidang 3.150 orang	-
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100 %	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor BKPP DIY 3 Jenis	Terbangun gedung yang dapat dimanfaatkan sesuai standar sarpras 100%

No	Nama Program	Target Kinerja	Kegiatan	Kegiatan 2017	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100 %	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp 137.581.300	Rp 150.000.000	Peralatan gedung kantor 23 jenis	Tersedia peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%
						Perlengkapan gedung kantor 7 Jenis	-
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100 %	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Rp 117.239.200	Rp 100.000.000	Gedung kantor dan prasarananya terpelihara 8 jenis	Terpelihara rumah dan gedung 100%
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100 %	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 212.750.000	Rp 234.025.000	Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara 18 Unit	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%
						Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara 6 unit	-
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100 %	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp 103.500.000	Rp 110.000.000	Peralatan gedung kantor terpelihara 12 Jenis	Terpelihara peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%
						Perlengkapan gedung kantor terpelihara 14 Jenis	-
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	100 %	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Rp 26.075.000	Rp 26.000.000	Penilaian 19 orang pejabat fungsional tertentu 19 DUPAK	Bimbingan panduan pelaksanaan (DUPAK) terlaksana 100%
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100 %	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Rp 5.346.000	Rp 6.000.000	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017	Nilai LKJIP : B

No	Nama Program	Target Kinerja	Kegiatan	Kegiatan 2017	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
11	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100 %	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Rp 10.435.000	Rp 11.475.000	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program 21 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%
12	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100 %	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Rp 226.907.700	Rp 222.250.000	ROPK, Renja, RKA, DPA, sistem informasi dan database ketahanan pangan sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2018 dan Perubahan TA. 2017 serta sistem informasi dan database ketahanan pangan tersedia 100%
13	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100 %	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Rp 39.211.300	Rp 41.500.000	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 10 program 21 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%
14	PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	14 Desa	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Rp 1.086.429.800	Rp 1.450.000.000	Buku peta desa rawan pangan sejumlah 2 dokumen	Dokumen dan kegiatan optimalisasi desa rawan pangan terlaksana 100 % dan tepat waktu
						Gerakan optimalisasi potensi desa sejumlah 23 desa	
						Informasi data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) FSVA dan SKPG (sistem kewaspadaan pangan dan gizi) sejumlah 9 kali	
						Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat DIY sejumlah 10 sub kategori	

No	Nama Program	Target Kinerja	Kegiatan	Kegiatan 2017	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
						Penghargaan Desa Mandiri Pangan berprestasi sejumlah 1 kali	
						Penghargaan terhadap desa berprestasi oleh Bapak Gubernur sejumlah 1 kali	
						Rumusan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY sejumlah 2 kali	
15	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN	450 Ton Setara beras	Penyediaan Cadangan Pangan	Rp 739.705.400	Rp 913.290.000	Cadangan pangan pemerintah sejumlah 10 ton beras	Cadangan pangan tahun 2017 tersedia 100% tepat waktu
						Informasi cadangan pangan dan penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan sejumlah 8 laporan (Neraca Bahan Makanan sementara dan Tetap, Prognosa, Aram 1 dan 2, HKBN (puasa, lebaran, dan natal)	
16	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	90 %	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Serimbang dan Aman	Rp 615.163.650	Rp 650.000.000	Informasi dan pengetahuan tentang penganeekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan pada 5 lokasi	Publikasi tentang keanekaragaman dan keamanan pangan terlaksana 100% tepat waktu
						Informasi Pangan pada HPS Tingkat DIY, PENAS 2017 dan HPS/Event Nasional sejumlah 3 kali	

No	Nama Program	Target Kinerja	Kegiatan	Kegiatan 2017	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
						Publikasi pangan lokal dan konsumsi B2SA melalui media cetak dan elektronik sejumlah 7 kali	
17	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	90 %	Pengembangan Diversifikasi Produk Antara	Rp 115.566.350	Rp 125.000.000	Jumlah pelaku usaha produk antara dan pengolah pangan lokal yang mendapat pelatihan meningkat sejumlah 28 kelompok (semula 112 kelompok menjadi 140 kelompok)	Pelatihan pengembangan pangan pokok lokal terlaksana 100% tepat waktu
						Pengetahuan dan keterampilan kelompok pelaksana MP3L (Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal) meningkat sejumlah 3 Kelompok/UKM pengelola MP3L	
18	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	90 %	Penanganan Keamanan Pangan	Rp 1.122.210.000	Rp 1.300.000.000	Informasi produk pangan aman dikonsumsi sejumlah 3 kali	Keamanan pangan terjamin selama 1 tahun
						Jumlah pelaku usaha pangan yang mendapat pelatihan tentang cara produksi pangan IRT yang baik dan cara pengemasan yang menarik meningkat sejumlah 10 kelompok (semula 40 kelompok menjadi 50 kelompok)	
						Keamanan pangan terjamin selama 1 tahun	
						Pedoman kantin sehat, aman, dan ramah lingkungan sejumlah 1 dokumen	
						Sertifikat Prima, PD, dan PH sejumlah 25 sertifikat/register dan hasil surveilen	

No	Nama Program	Target Kinerja	Kegiatan	Kegiatan 2017	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
19	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN	100 %	Distribusi Pangan Masyarakat	Rp 331.293.200	Rp 464.726.900	Informasi harga dan distribusi pangan serta informasi pasokan dan akses pangan (2 jenis data)	Distribusi pangan tercapai 100% tepat waktu
						Stabilisasi harga pangan pokok di tingkat petani (beras) dan di daerah rawan pangan (beras, gula, minyak goreng, dan telur) sebanyak 20 gapoktan pengelola LDPM dan LAPM	-
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN	100 %	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan	Rp 1.835.860.000	Rp 1.526.000.000	Jumlah klas kelompok pelaku utama dan pelaku usaha meningkat 75 kelompok (semula 180 kelompok menjadi 255 kelompok)	Penyelenggaraan penyuluhan optimal dan penyuluh yang meningkat kapasitasnya sebesar 100% tepat sasaran
						Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh meningkat 265 orang (semula 1.312 orang menjadi 1.577 orang)	-
						Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti pelatihan/magang meningkat 195 orang (semula 460 orang menjadi 655 orang)	-
						Keikutsertaan pada PENAS 2017 sebanyak 40 orang	-

Rencana Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Keistimewaan DIY

No	Nama Program	Target Kinerja	Kegiatan	Kegiatan 2017	Kegiatan 2018	Keluaran Tolok Ukur	Target
21	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL	100 %	Pengembangan Kuliner Khas Yogyakarta	Rp 500.000.000,00	Rp 525.000.000,00	1. Festival kuliner khas yogyakarta berbahan dasar lokal pada 5 kab/kota 2. Lantip Trengginas dengan materi kuliner khas yogyakarta sejumlah 5 regu Mewakili 5 kab/kota	Pengetahuan kuliner khas Yogyakarta dengan bahan baku lokal terinformasikan 100% tepat waktu dan sasaran

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan sebuah dokumen perencanaan yang bersifat strategis. Penyusunan Renja mengacu dan atau menjabarkan arah dan kebijakan yang tercantum dalam RPJP serta RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, Renstra BKPP DIY Tahun 2012-2017 maupun integrasi dokumen-dokumen perencanaan lainnya terutama yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan.

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan anggaran, prioritas program, dan kegiatan tahunan dari berbagai sumber dana. Selain itu Renja dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja yang implementasinya dijabarkan lebih rinci dalam sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan. Untuk itu rencana kerja perlu dievaluasi dengan memperhatikan kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan serta aspirasi masyarakat.

Pada akhir tahun anggaran, Renja juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui Laporan Kinerja Pemerintah yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja.